

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2021**



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Kota Dumai

WALI KOTA DUMAI

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI

NOMOR : 15/SK/DPPPA/2021

T E N T A N G

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2021

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab diperlukan peningkatan budaya kerja dan etos kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas;
 - b. Bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021, sebagai tindak lanjutnya perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Dumai tentang perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Daerah Kota Dumai Nomor 8 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Dumai;
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;

16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kota Dumai tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2021;**

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 adalah Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun 2021.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 merupakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai tugas, pokok dan fungsi, menjamin komitmen dan konsistensi perencanaan dan program serta kegiatan sebagai landasan dalam penentuan program dan kegiatan tahunan serta acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **D U M A I**

Pada tanggal : **26 Agustus 2021**

An. WALI KOTA DUMAI
Plt. KEPALA,

Ir. ZULKARNAIN, M.Si

NIP. 19670123 199312 1 001

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Dumai Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai tahun 2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2016-2021. Kedua dokumen acuan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang diarahkan untuk mewujudkan *Visi Kota Dumai “Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan perubahan rencana kerja ini masih banyak kekurangan dan belum mampu mengkoordinir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan sehingga membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen ini.

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Dumai, 26 Agustus 2021
Plt. Kepala

Ir. ZULKARNAIN, M.Si
NIP.19670123 199312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Indikator Kinerja.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Dumai.....	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	29
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	37
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil RKPD.....	15
Tabel 2.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan	28
Tabel 2.3	Faktor Penghambatan dan Faktor Pendorong Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Telaah Visi, Misi dan Program pada RPJMD Kota Dumai 2016-2021	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan rencana pembangunantahunan organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disebut perubahan rencana kerjaorganisasi perangkat daerah adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.Perubahan rencana kerja ini merupakan perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan pagu indikatif.

Proses penyusunan perubahan rencana kerjameliputi : (1) persiapan penyusunan perubahan rencana kerja; (2) penyusunan rancangan awal perubahan rencana kerja; (3) penyusunan rancangan perubahan rencana kerja; (4) pelaksanaan forum/ lintas perangkat daerah; (5) perumusan rancangan akhir perubahan rencana kerja; (6) penetapan perubahan rencana kerja.

Rencana kerja memiliki keterkaitan dengan perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Mengingat arti strategis dokumen perubahan rencana kerja organisasi perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen perubahan rencana kerjaorganisasi perangkat daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan tentang :

1. Pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.
2. Program dalam perubahan rencana kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja organisasi perangkat daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
4. Program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan perubahan rencana kerjadinan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota dumai tahun 2021, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);

14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Dumai;
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 adalah :

1. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di Rencana Kerja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerjadan Capaian Indikator Kinerja Utama
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 Sampai Dengan Triwulan Kedua

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJADAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN KEDUA**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu disesuaikan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk Rencana Kerja tahun berjalan.

Berikut ini merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020 Dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020 :

2.1.1 Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu :

Semua program kegiatan memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

2.1.2 Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.850.000 dan terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.850.000 atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 121.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 99.192.733 atau 81,84% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik dengan target 12 bulan atau 100%.

c. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.11.388.000 dan terealisasi sebesar Rp.11.388.000 atau 99,98% dengan indikator keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 100% dan terealisasi 100%.

d. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.19.400.000 dan terealisasi sebesar Rp.8.647.000 dengan indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 12 bulandanterealisasi 12 bulan atau 100%.

e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 49.352.675 dan terealisasi Rp. 48.733.450 atau 98,75% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 79.931.455 dan terealisasi Rp. 79.168.035 atau 99,04% dengan indikator kinerja keluaran

adalah tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.67.147.670 dan terealisasi Rp.66.690.400 atau 99.32% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

h. Kegiatan penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.682.100 dan terealisasi Rp. 8.681.350 atau 99.99% dengan indikator keluaran adalah tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan target 12 bulan.

i. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedianya untuk kegiatan ini sebesar Rp.10.500.000 dan terealisasi Rp.8.520.000 atau 81.14% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan bacaan dan informasi bagi aparatur dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.20.460.000 dan terealisasi Rp.20.460.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersedianya makan dan minum rapat dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%, serta tersedianya makanan dan minuman tamu dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.296.448.000 dan terealisasi Rp.296.448.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersedianya fasilitas pendukung perjalanan dinas bagi aparatur dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

l. Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.43.545.000 dan terealisasi Rp.43.519.998 atau 99.94% dengan indikator keluaran adalah tersedianya pelayanan pengamanan perkantoran dengan target 12 bulandan realisasi 12 bulan atau 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.119.992.000 dan terealisasi Rp.119.139.000 atau 99.29% dengan indikator keluaran adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor dengan target 5 unit dan terealisasi sebanyak 5 unit atau 100%.

b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.9.600.000 dan terealisasi Rp.9.600.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersedianya perlengkapan kantor yang dapat berfungsi dengan baik dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.9.750.000 dan terealisasi Rp.9.750.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

d. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70.000.000 dan terealisasi Rp. 69.857.000 atau 99.80% dengan indikator keluaran adalah tersedianya sarana kerja yang layak dengan target 1 paket dan terealisasi 1 paket atau 100%.

e. Pemeliharaan rutin berkala/ berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 128.480.000 dan terealisasi Rp. 128.480.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersedianya kebutuhan kendaraan dinas operasional dan terpenuhinya jasa supir kendaraan dinas dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.31.415.000 dan terealisasi Rp.31.415.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersusunnya Dokumen LKJ, LPPD, LKPJ dan Rencana Strategi dengan target 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%.

b. Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.19.527.000 dan terealisasi Rp.19.192.000 atau 98.28% dengan indikator keluaran adalah tersusunnya Rencana Kerja anggaran murni dan perubahan dengan target 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.

c. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.5.545.000 dan terealisasi Rp.5.545.000 atau 100% dengan indikator keluaran adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

a. Kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.41.035.470 dan terealisasi Rp.40.486.870 atau 98.66% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya kegiatan lokakarya agenda politik perempuan dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%.

5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

a. Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.373.971.510 dan terealisasi Rp.367.487.906 atau 98.27% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan dan anak

dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, terlaksananya pendataan gender dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, serta terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi perempuan dengan target 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100%.

- b. Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.31.872.495 dan terealisasi Rp.25.872.495 atau 81.17% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan target 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang atau 100%.

- c. Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.98.160.000 dan terealisasi Rp.97.004.300 atau 98.82% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya pembentukan dan pengukuhan forum anak 2019-2021 dengan target 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang atau 100%.

- d. Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.173.264.000 dan terealisasi Rp.172.691.163 atau 99.67% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya bimbingan teknis Sekolah Ramah Anak dengan target 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau 100%.

- e. Evaluasi pelaksanaan PUG

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.99.620.000 dan terealisasi Rp.85.498.700 atau 85.82% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%.

- f. Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.177.487.420 dan terealisasi Rp.173.360.141 atau 97.67% dengan indikator keluaran adalah tersedianya profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, serta tersedianya media informasi dengan target 75% dan terealisasi sebesar 100%.

- g. Kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.198.668.800 dan terealisasi Rp.198.050.526 atau 99.69% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan target 50 kasus dan terealisasi sebanyak 50 kasus atau 100%.

- h. Kegiatan pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.161.700.000 dan terealisasi Rp.160.649.856 atau 99.35% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya bimbingan teknis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target 15 Kelurahan dan terealisasi sebanyak 15 Kelurahan atau 100%.

6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

- a. Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) Sumber Daya Manusia pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.113.459.000 dan terealisasi Rp.113.362.000 atau 99.91% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya pelatihan bagi pelatih (TOT) Sumber Daya Manusia pelayanan dan pendampingan korban KDRT dengan target 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang atau 100%.

- b. Kegiatan workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.49.157.500 dan terealisasi Rp.48.171.124 atau 97.99% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan

sebagai kepala keluarga dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%.

- c. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 171.414.000 dan terealisasi Rp. 169.749.340 atau 99.03% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya pelatihan keterampilan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dengan target 35 orang dan terealisasi sebanyak 35 orang atau 100%.
- d. Kegiatan pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 162.328.000 dan terealisasi Rp. 161.895.975 atau 99.73% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya upaya pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di Kelurahan dengan target kinerja sebanyak 100% dan terealisasi 100%.

7. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

- a. Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 353.939.830 dan terealisasi Rp. 344.775.439 atau 97.41% dengan indikator keluaran adalah terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan dengan target 30 organisasi dan terealisasi sebanyak 30 organisasi atau 100%, terlaksananya peringatan seminar, dan lomba dalam rangka hari Kartini dan hari Ibu dengan target 2 kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau 100%.
- b. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 65.673.000 dan terealisasi Rp. 65.473.623 atau 99.70% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan target 10 kelurahan dan terealisasi sebanyak 10 kelurahan atau 100%. Serta terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dengan target 1 kecamatan dan terealisasi sebanyak 100%.

- c. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 101.533.500 dan terealisasi Rp. 86.263.500 atau 84,96 % dengan indikator keluaran adalah terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha dengan target 7 Kecamatan dan terealisasi sebanyak 7 Kecamatan atau 100%.
- 8. Program penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah
 - a. Kegiatan penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi Rp. 46.556.300 atau 93,11% dengan indikator keluaran adalah terlaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai keliling Idul Fitri dan Idul Adha dengan target 3 kegiatan dan terealisasi 100%.
- 9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - a. Kegiatan peningkatan manajemen aset / barang daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000 dan terealisasi Rp. 29.999.004 atau 100% dengan indikator keluaran adalah Peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah dengan target 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.
- 2.1.3 Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran dari yang direncanakan
- 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
Tidak ada program/kegiatan yang tidak terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - 1. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/kegiatan
 - a. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kepala Dinas dan jajaran yang ada di lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- b. Mitra kerja yang mampu menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu dan memuaskan.
 - c. Telah terjalinnya kerjasama yang baik antar organisasi perangkat daerah terkait
 - d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam hal pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat Daerah
- 1. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas SDM Aparatur, SDM pendamping dan manajer kasus
 - 2. Bertambahnya sarana pendukung kelancaran tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
 - 3. Meningkatnya partisipasi perempuan dibidang politik dan jabatan publik serta meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak
 - 4. Meningkatnya peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera
- 2.1.6 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- 1. Membangun kerjasama team work
 - 2. Melakukan Monitoring Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sudah dilakukan, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan program/kegiatan yang belum/tidak tercapai
 - 3. Merumuskan dan membuat perencanaan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program/kegiatan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja serta pencapaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat dalam table 2.1 di bawah ini

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)					0	29,491,550	50							100	6,075,000	0.00%	20.60%				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							29,491,550									6,075,000		20.60%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah (100%)					0	302,299,807	25							50	58,385,836	0.00%	19.31%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)					0	8,602,709	10			-	25	1,975,500		25	1,975,500	0.00%	22.96%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)					0	69,170,170	-			-	25	16,053,750		25	16,053,750	0.00%	23.21%				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya jasa keamanan kantor, tersedianya peralatan rumah tangga (Bulan)					0	7,689,150	10			-	25	1,484,500		25	1,484,500	0.00%	19.31%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (Bulan)					0	14,955,000	25			-	50	2,536,000		50	2,536,000	0.00%	16.96%				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)					0	57,815,478	20			-	40	10,976,000		40	10,976,000	0.00%	18.98%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan informasi aparatur (Bulan)					0	8,407,500	25			-	50	2,768,010		50	2,768,010	0.00%	32.92%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Tahun)					0	135,659,800	15			-	35	22,592,076		35	22,592,076	0.00%	16.65%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)					0	551,567,767	-				35			35	28,264,000	0.00%	5.12%				
		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor (Bulan)					0	24,441,900	-			-	30	-		30	-	0.00%	0.00%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (Bulan)					0	77,792,550	-			-	5	12,640,000		5	12,640,000	0.00%	16.25%				

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala (Bulan)				0	449,333,317	-	-	-	15,624,000						-	15,624,000	0.00%	3.48%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah (Bulan)				0	818,459,100	25		50							50	275,322,660	0.00%	33.64%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan surat menyurat (Bulan)				0	450,000	-	-	-	-						-	-	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik (Bulan)				0	122,669,100	25	-	50	37,112,660						75	37,112,660	0.00%	30.25%				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)				0	13,740,000	-	-	30	7,610,000						30	7,610,000	0.00%	55.39%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Bulan)				0	681,600,000	25	-	50	230,600,000						50	230,600,000	0.00%	33.83%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah (Bulan)				0	128,652,482	25		50							50	32,945,000	0.00%	25.61%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional secara rutin/berkala (Bulan)				0	72,090,000	20	-	40	30,515,000						40	30,515,000	0.00%	42.33%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (Bulan)				0	7,340,000	-	-	15	-						15	-	0.00%	0.00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala, terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkal (Bulan)				0	5,680,000	25	-	50	1,050,000						50	1,050,000	0.00%	18.49%				

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan (Kecamatan)				0	34,940,000	-	-	80	15,920,000					80	15,920,000	0.00%	45.56%				
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi					76,302,000										9,153,779		12.00%				
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pegaduan masyarakat terkait korban kekerasan perempuan (Orang)				0	19,746,000	-	-	75	2,850,000					75	2,850,000	0.00%	14.43%				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota (Tahun)				0	56,556,000	-	-	45	6,303,779					45	6,303,779	0.00%	11.15%				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatana dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan					83,580,790										3,030,000		3.63%				

	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui Bimtek konvensi hak anak, bimtek PATBM, informasi layak anak, pusat pembelajaran keluarga dan melalui bimbingan teknis Sekolah ramah anak, terselenggaranya penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak, Parenting edukasi, dan pusat pembelajaran keluarga (Orang, Kecamatan, Sekolah)				0	42,839,920	30	-	50	13,207,700		50	13,207,700	0.00%	30.83%				
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui bimtek Konvensi Hak Anak, melalui bimtek PATBM, informasi layak anak, pusat pembelajaran keluarga dan melalui bimbingan teknis Sekolah Ramah Anak (Orang, Kecamatan, Sekolah)				0	55,507,240	-	-	100	37,544,500		100	37,544,500	0.00%	67.64%				
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas Kota Layak Anak, terselenggaranya rapat percepatan implementasi Kecamatan layak anak (orang, kecamatan)				0	19,602,490	-	-	100	19,093,700		100	19,093,700	0.00%	97.40%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0.00%	35.95%				

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merujuk pada Bab VIII Rancangan Awal Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021. Adapun indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2019 sesuai revisi RPJMD 2016 – 2021 sebagai berikut :

a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar

Ada beberapa kegiatan yang mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
2. Pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 85%, sedangkan tahun 2020 dengan target 90 %.

b. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2019 dengan target sebesar 54,01%, sedangkan Tahun 2020 , dengan target 54,85%.

Ada beberapa kegiatan yang mendukung indicator kinerja diatas antara lain:

1. Perumusan kebijakan peningkatan peran serta dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan public
2. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
3. Workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga
4. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
5. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

c. Indeks Pembangunan Gender

Tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender Kota Dumai dengan target sebesar 88 sedangkan pada tahun 2020 dengan target sebesar 89. Kegiatan yang mendukung

capaian Indeks Pembangunan Gender adalah kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.

d. Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Pada tahun 2019 capaian kota layak anak untuk kota Dumai mendapat predikat Nindya sesuai dengan target capaian kota layak anak pada tahun tersebut. Tahun 2020 target capaian kota layak anak dengan predikat Nindya.

Beberapa kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak

e. Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Tahun 2019 persentase perempuan terhadap tindakan kekerasan termasuk TPPO dengan target sebesar 0,095 % sedangkan pada tahun 2020 dengan target 0,090 %.

Beberapa kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
2. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
3. Pelatihan bagi pelatih (TOT) sumber daya manusia pelayanan dan pendampingan korban dalam kekerasan dalam rumah tangga

Tabel 2.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingginya kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak	Belum optimalnya kualitas pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih kurangnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan kasus
2.	Belum semua anak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik seperti penelantaran anak dalam hal pekerja anak dibawah umur, perkawinan diusia dini dan anak berhadapan dengan hokum (ABH)	Belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak anak	Masih kurangnya kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak
3.	Pemanfaatan data untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan belum optimal	Belum optimalnya pendataan gender dan anak di Kota Dumai	Belum semua perangkat Daerah terkait yang menggunakan sistem data terpilah

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

1.1 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Indeks Pembangunan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kota Dumai menunjukkan perkembangan yang bagus, dengan realisasi kinerja sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yaitu dari 88 menjadi 90,52 (melebihi target). Salah satu indikator penting dalam pengukuran IPG adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan elemen kunci yang sering dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bersama angka kesakitan, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

b. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total jumlah perempuan usia kerja. Target dari indikator sasaran ini yaitu 53.05 % dengan realisasi capaian capaian pada tahun 2019 sebesar 54.85% atau sebanyak 11.918 jiwa perempuan yang bekerja dari 22.867 jiwa penduduk perempuan usia kerja. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 52.12%.

c. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar.

Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 82.76% pada tahun 2019 menjadi 93.8% (melebihi target kinerja) pada tahun 2019 atau sebanyak 121 kasus yang telah mendapatkan penanganan sesuai standar dari 129 kasus yang dilaporkan pada tahun 2019. Beberapa upaya yang

telah dilakukan pada tahun 2019 dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai dimana semua kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT Kota Dumai telah ditindaklanjuti atau telah mendapat penanganan sesuai standar.

- d. Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO di Kota Dumai pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 48 kasus pada tahun 2017 atau sebesar 0.03% menjadi 32 kasus pada tahun 2018 atau sebesar 0.02%. Angka ini masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 0.100%. Capaian ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu 140.268 jiwa penduduk perempuan Kota Dumai tahun 2019, ditemukan sebanyak 72 kasus perempuan korban kekerasan termasuk TPPO atau sebesar 0,051%, namun masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 0.095% (semakin rendah kasus yang ditemukan maka semakin baik capaian kinerja). Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO di Kota Dumai mengalami kenaikan yang cukup berarti pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah target capaian 0,095%. Hal ini disebabkan karena telah berfungsinya Unit Pelaksanaan teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai salah satu wadah perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Dumai.

- e. Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Pada Tahun 2018 capaian Kota Layak Anak untuk Kota Dumai masih dalam predikat Madya dan pada tahun 2019 capaian kota layak anak masih dengan predikat Madya (2) atau sebesar 66,7% (belum mencapai target) yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu predikat Nindya (3). Salah satu yang menjadi criteria penting dalam penilaian kota layak anak adalah adanya data terpilah gender dan anak sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan yang responsive gender, namun belum semua Perangkat Daerah di kota Dumai memiliki data terpilah gender dan anak sehingga penginputan analisis gender belum bias dilaksanakan secara optimal.

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

f. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan program kegiatan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan serta penanganan kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga – tenaga ahli dan professional dibidangnya seperti Psikolog, Psikiater, serta tenaga ahli lainnya.
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak anak sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014;
- 4) Belum optimalnya pendataan gender dan anak di Kota Dumai yang disebabkan karena belum semua Organisasi Perangkat Daerah terkait menggunakan system data terpisah.

g. Hambatan yang dihadapi

Terbatasnya anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sehingga belum semua program –program kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pencapaian Visi Kota Dumai yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”** dan Misi ke-4 **“Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, partisipatif dan Transparan.”**

2. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Walikota Dumai, terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing yang mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan

yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif untuk memacu pelaksanaan pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung pencapaian Misi ke -4 Pemerintah Kota Dumai yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.”** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah meningkatnya kualitas pembangunan gender, dengan sasaran yaitu meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas PPPA

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- 2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- 3) Pengungkapan kasus-kasus kekerasan termasuk TPPO terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 4) Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan, dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak.

b. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.

- 2) Undang-undang 23 tahun 2014 mengamanatkan sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota sehingga memudahkan pencapaian target Nasional maupun target Pemerintah Daerah dalam pembangunan responsif gender;
 - 3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
 - 4) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) .
 - 5) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
 - 6) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
 - 7) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan.

Adapun rekomendasi dan strategis dilakukan dalam merumuskan program dan kegiatan :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, meningkatkan partisipasi perempuan untuk menjadi anggota legislatif, mengadvokasi pimpinan Partai Politik untuk menempatkan perempuan sebagai calon legislatif, fasilitasi pembentukan *gender champion*, pemberian pelatihan

keterampilan bantuan alat bagi kelompok rentan, meningkatkan kapasitas perencanaan dalam PPRG, meningkatkan cakupan ARG dalam APBD dan memperkuat kelembagaan PUG serta pemanfaatan data terpilah.

- b. Memperkuat kerjasama antara Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Layanan, Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO, melalui :
 - 1) Penguatan regulasi dalam penanganan kasus termasuk penegakan hukum yang berkeadilan,
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah,
 - 3) Peningkatan pemahaman Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO,
 - 4) Pemulihan korban reintegrasi sosial,
 - 5) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan penanganan korban,
 - 6) Fasilitasi penyediaan bantuan hukum bagi yang membutuhkan.
- c. Mempercepat capaian peringkat Kota Layak Anak melalui :
 - 1) Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak,
 - 2) Penguatan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pencapaian Kota Layak Anak .
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
 - 4) Advokasi kepada Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
 - 5) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak dalam pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di Kota Dumai.
- d. Meningkatkan perlindungan anak berkebutuhan khusus melalui harmonisasi berbagai kebijakan perlindungan khusus anak, memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di Kota Dumai untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak, menguatkan kapasitas anak berkebutuhan khusus,

menyediakan sarana dan prasarana penunjang, serta memperkuat keberdayaan anak berkebutuhan khusus agar setara dengan anak-anak lainnya.

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat implementasi PUG melalui workshop perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang, pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat kota, memperkuat lembaga/jejaring PUG di Kota Dumai untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG dan memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak.
- f. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana penguatan regulasi dan perbaikan layanan penunjang tugas dan fungsi.

Tabel 2.3

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Telaah Visi, misi dan Program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan kasus ➤ Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) ➤ Minimnya dukungan dana kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Dumai 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partisipasi masyarakat dalam hal perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan di jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai ➤ Mitra kerja yang mampu menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu dan memuaskan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan ➤ Meningkatnya pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

208107	0201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	4 Kali	4 Kali		100 %	9,510,900	8,756,750	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,700,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														4,173,892,552	4,633,041,020			2,364,723,075		
208102	0201	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	14 Bulan	14 Bulan		100%	4,163,488,002	4,622,636,470	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,352,748,700
208105	0201	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya koordinasi penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Tahun 1 Dokumen	12 Bulan 1 Dokumen		100%	10,404,550	10,404,550	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	11,974,375
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														29,491,550	29,491,550			34,500,000		
208106	0201	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah	Terpenuhiya dokumen pelaporan inventarisasi aset	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen		100%	29,491,550	29,491,550	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	34,500,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														0	0			83,053,000		
208102	0201	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tercapainya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	32 Stel 32 Stel	0 Stel 0 Stel		100%	0	0	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	40,250,000
208109	0201	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya Pendidikan dan pelatihan formal (12 bulan)	Tercapainya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	0 Bulan		100%	0	0	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	17,089,000
208101	0201	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur sipil negara yang melaksanakan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan	Tercapainya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 Orang	0 Orang		100%	0	0	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	25,714,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah														302,299,807	316,748,432			1,322,514,458		
208106	0201	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	12 Bulan	12 Bulan		100%	8,602,709	13,096,172	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	26,450,000
208102	0201	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100%	12 Bulan	12 Bulan		100%	69,170,170	86,178,532	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	98,462,888

208103	0206	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai		100 %	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan		100%	7,689,150	16,322,250	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	346,914,750
208104	0206	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan logistik kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan		100%	14,955,000	25,235,000	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	34,914,000
208105	0206	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai		100 %	12 Bulan	12 Bulan		100%	57,815,478	57,815,478	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	83,958,820
208106	0206	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan informasi aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai		100 %	12 Bulan	12 Bulan		100%	8,407,500	8,407,500	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	17,664,000
208109	0206	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD luar daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai		100 %	1 Tahun	1 Tahun		100%	135,659,800	109,693,500	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	714,150,000
2812		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											551,567,767	556,059,517					1,247,915,110
208107	0205	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya mebel kantor	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai		100 %	12 Bulan	12 Bulan		100%	24,441,900	24,441,900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	28,108,185
208106	0206	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai		100 %	12 Bulan	12 Bulan		100%	77,792,550	82,284,300	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	92,252,588
208109	0206	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai		100 %	12 Bulan	12 Bulan		100%	449,333,317	449,333,317	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1,075,804,337
208107	0206	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai		100 %	12 Bulan	12 Bulan		100%	0	0	Dana Perimbangan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	51,750,000
2812		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											818,459,100	809,459,025					514,669,819
208108	0201	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa umum Perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	450,000	450,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	6,254,819

20810208	0208	0208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	122,669,100	98,669,025	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	144,969,000
20810308	0208	0208	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa umum perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	13,740,000	13,740,000	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	137,126,000
20810408	0208	0208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya penyediaan jasa umum perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	681,600,000	696,600,000	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	226,320,000
28112	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											128,652,482	157,872,482			271,745,000	
20810109	0201	0201	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Operasional	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional secara / Rutin/Berkala	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100%	72,090,000	105,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	202,492,000
20810209	0202	0202	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100%	7,340,000	3,000,000	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,774,000
20810609	0206	0206	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor secara Rutin / Berkala Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor secara Rutin / Berkala	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100%	5,680,000	5,680,000	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	16,629,000
20810909	0209	0209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100%	36,832,482	36,832,482	Dana Perimbangan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	11,500,000
20810109	0201	0201	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya rumah dinas	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100%	6,710,000	6,710,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,350,000
282	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											390,161,870	368,711,870			1,400,542,910	
2822	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											99,793,250	89,847,250			259,900,000	

2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	Tercapainya ARG Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5%	1 tahun	1 Tahun		10%	50,492,000	40,546,000	Dana Perimbangan	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	5%	127,489,000
2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	1. Tersusunnya rumusan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Dumai (1 rumusan Peraturan Daerah) 2. Jumlah pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG (6 PD dan 7 Kecamatan) 2. jumlah pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG	Tercapainya ARG Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5%	1 Peraturan Daerah 7 Kecamatan	1 Peraturan Daerah 7 Kecamatan		10%	49,301,250	49,301,250	Dana Perimbangan	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	5%	74,911,000
2	0	0	2	0	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG Terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG (36 PD dan 7 Kecamatan)	Tercapainya ARG Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5%	7 Kecamatan 36 Perangkat Daerah	0 Kecamatan 0 Perangkat Daerah		10%	0	0	Dana Perimbangan	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	5%	57,500,000
2	8	2	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											190,368,830	190,368,830				310,112,910
2	0	0	2	0	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi (100 orang) Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, (100 orang)	Tercapainya Partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5%	100 Orang 100 Orang	100 Orang 100 Orang		80%	190,368,830	190,368,830	Dana Perimbangan	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	5%	275,612,910
2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan bidang Ekonomi	tercapainya partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5%	7 Kecamatan	0 Kecamatan		80 %	0	0	Dana Perimbangan	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	5%	34,500,000

2	8	2	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									99,999,790	88,495,790			830,530,000						
2	0	0	2	0	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Kota Dumai	Meningkatnya SDM perempuan dalam peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5%	45 organisasi perempuan	0 Organisasi perempuan		80 %	0	0	Dana Perimbangan		Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	5%	51,750,000
2	0	0	2	0	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	1. Terselenggaranya pelatihan manajemen organisasi perempuan (150 orang) 2. Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (30 orang)	Meningkatnya SDM perempuan dalam peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5%	150 orang 30 orang	0 Orang 0 Orang		80 %	0	0	Dana Perimbangan		Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	5%	263,396,000
2	0	0	2	0	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender (5 kegiatan)	Meningkatnya SDM perempuan dalam peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5%	5 Kegiatan	5 Kegiatan		80 %	99,999,790	88,495,790	Dana Perimbangan		Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai	10 %	515,384,000
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									194,822,790	266,704,600			450,519,106						
2	8	3	2	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									34,940,000	34,940,000			80,716,200						
2	0	0	2	0	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan (7 kecamatan)	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10%	7 Kecamatan	7 Kecamatan		1 Kegiatan	34,940,000	34,940,000	Dana Perimbangan		Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	10%	80,716,200
2	8	3	2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									76,302,000	72,677,000			169,435,250						
2	0	0	2	0	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terkait Korban Kekerasan Perempuan	Terselenggaranya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10%	30 Orang	30 Orang		12 Bulan	19,746,000	19,746,000	Dana Perimbangan		Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	10%	69,018,400
2	0	0	2	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terselenggaranya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10%	1 Tahun	1 Tahun		12 Bulan	56,556,000	52,931,000	Dana Perimbangan		Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	10%	100,416,850

2	8	3	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									83,580,790	159,087,600					200,367,656		
2	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	1. Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya satuan tugas perlindungan perempuan korban kekerasan (20 orang) 2. Terlaksananya bimbingan teknis satuan tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (20 orang) 3. Terlaksananya pelatihan manajemen kasus SDM UPTD PPA 3. Terlaksananya Sistem Pendataan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui SIMFONI PPA	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10%	20 Orang	20 Orang 20 Orang 30 Orang 30 Orang		12 Bulan	34,240,100	111,846,910	Dana Perimbangan DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	10%	85,367,656
2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dana Perimbangan	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	10%	57,500,000	
2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dana Perimbangan	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	10%	57,500,000	
2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dana Perimbangan	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	10%	57,500,000	
2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dana Perimbangan	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	10%	57,500,000	
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									16,182,730	16,182,730					320,485,192			
2	8	4	2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									0	0					138,906,718		
2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dana Perimbangan	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	55%	138,906,718	
2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				181,578,474	

20840201	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat	Meningkatnya kualitas keluarga di Kota Dumai	Terlaksananya pendampingan peningkatan kualitas keluarga	Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55%	7 Kecamatan	3 Kecamatan		5 Lembaga	6,149,340	6,149,340	Dana Perimbangan		Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	55%	51,750,000			
20840202	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	Terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga (50 orang)	Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55%	50 Orang	0 Orang		5 Lembaga	0	0	Dana Perimbangan		Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	55%	72,328,474			
20840203	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat	Meningkatnya kualitas keluarga di Kota Dumai	Terbentuknya forum perempuan sebagai kepala keluarga (7 kecamatan)	Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55%	7 Kecamatan	3 Kecamatan		5 Lembaga	10,033,390	10,033,390	Dana Perimbangan		Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Dumai	55%	57,500,000			
2085	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																		522,032,150		
20852	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				522,032,150
208501	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak	1. Tersedianya data terpilah gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak di Kota Dumai	Tersedianya data gender dan anak Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25%	1 Dokumen	1 Dokumen		2 Dokumen	34,652,850	34,652,850	Dana Perimbangan		Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	25%	179,400,000			
208502	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak	1. Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai (1 Dokumen) 2. Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai (1 Dokumen) 3. Tersedianya media informasi gender dan anak	Tersedianya data gender dan anak Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25%	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Jenis	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Jenis		2 Dokumen	43,072,398	43,072,398	Dana Perimbangan		Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak	25%	342,632,150			
20860	PRGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)																			859,625,000	
20860	Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah Nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota																				246,065,500
												206,120,995	246,109,995						859,625,000		
												88,171,345	78,180,345						246,065,500		

208601	201	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Skor Kota Layak Anak (>700)	Terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui PATBM Terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui Pukesmas Ramah Anak Terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui Sekolah Ramah Anak	Meningkatnya lembaga pemenuhan hak anak di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700 skor	250 Orang 10 Pukesmas 30 Sekolah	200 Orang 0 Pukesmas 0 Sekolah		135 Lembaga	37045345	37045345	Dana Perimbangan		Meningkatnya Capaian Skor Kota Layak Anak (>700)	700 skor	85,088,500
2086021	202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Skor Kota Layak Anak (>700)	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya lembaga pemenuhan hak anak di Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700 skor	12 Bulan	12 Bulan		135 Lembaga	51126000	41135000	Dana Perimbangan		Meningkatnya Capaian Skor Kota Layak Anak (>700)	700 skor	160,977,000
20862	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											117,949,650	167,929,650				613,559,500	
2086022	202	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Skor Kota Layak Anak (>700)	Terselenggaranya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak Terselenggaranya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak melalui Bimbingan Teknis PATBM, Informasi layak anak dan pusat pembelajaran keluarga Terselenggaranya Komunikasi dan Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak melalui Bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak Terselenggaranya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Parenting edukasi Terselenggaranya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Pusat Pembelajaran Keluarga	Meningkatnya lembaga penyedia layanan kualitas anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700 skor	50 orang 7 kecamatan 30 sekolah 7 kecamatan 7 Kecamatan	50 orang 7 kecamatan 30 sekolah 7 kecamatan 7 Kecamatan		20 lembaga	42,839,920	42,829,920	Dana Perimbangan		Meningkatnya Capaian Skor Kota Layak Anak (>700)	700 skor	307,763,000

208603	0203	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	Terselenggaranya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak Terselenggaranya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Bimbingan Teknis PATBM, Informasi layak anak, dan pusat pembelajaran keluarga Terselenggaranya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak	Meningkatnya lembaga penyedia layanan kualitas anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700 skor	50 orang 7 kecamatan 30 sekolah	50 orang 7 kecamatan 30 sekolah		20 lembaga	55,507,240	105,497,240	Dana Perimbangan	Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	700 Skore	273,865,600	
208604	0204	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya capaian skor Kota layak anak (> 700)	Terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak Terselenggaranya rapat percepatan implementasi kecamatan layak anak	Meningkatnya lembaga layanan kualitas anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700 skor	60 orang 7 kecamatan	60 orang 7 kecamatan		20 lembaga	19,602,490	19,602,490	Dana Perimbangan	Meningkatnya Capaian Skore Kota Layak Anak (>700)	700 skor	31,930,900	
2087		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											185,452,910	678,021,445				1,021,139,620	
2087		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												52,789,035					
20871	0202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30%		12 Bulan		12 Bulan	-	52,789,035	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	30%	0	
20872		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											185,452,910	625,232,410				1,021,139,620	
20872	0201	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten / Kota	Tersedianya layanan bagi anak memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30%	80 kasus	80 kasus		12 bulan	60,507,840	60,507,840	Dana Perimbangan	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	30%	300,506,500	

2087020	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30%	1 Tahun	12 Bulan		12 Bulan	33,300,000	478,479,500	Dana PerimbanganDAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	30%	489,699,320
2087030	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus Terlaksananya pelatihan dan pembinaan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang	Tersedianya layanan bagi anak memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30%	7 kecamatan 20 orang	7 kecamatan 20 orang		12 Bulan	31,886,890	26,486,890	Dana Perimbangan	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	30%	146,983,800
2087040	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Terselenggaranya penguatan jejaring Satuan tugas perlindungan anak Terselenggaranya penguatan jejaring satuan tugas tindak pidana perdagangan orang	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30%	7 Kecamatan 7 Kecamatan	7 Kecamatan 7 Kecamatan		12 Bulan	59,758,180	59,758,180	Dana Perimbangan	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	30%	83,950,000
TOTAL												7,135,523,801	8,216,821,914				18,508,669,009

BAB IV

PENUTUP

1.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Berdasarkan analisa SWOT, tantangan dan peluang Dinas PPPA Kota Dumai dalam meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Strengths (S) / Kekuatan :
 - a. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
 - b. Adanya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai yang merupakan wadah bagi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
 - c. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
2. Weakness (W) / Kelemahan :
 - a. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
 - b. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan perencanaan serta penganggaran responsif gender
 - c. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - d. Kualitas SDM petugas pendamping penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak masih rendah
3. Opportunities (O) / Peluang :
 - a. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
 - b. UU 23 tahun 2014 mengamanatkan sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabuapten/Kota sehingga memudahkan pencapaian target Nasional maupun target Pemerintah Daerah dalam pembangunan responsif gender.
 - c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS) memberikan kesempatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan kesepakatan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030.
 - e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
 - f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
 - g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Threats (T) / Ancaman :
- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM serta laporan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
 - b. Rendahnya keberdayaan masyarakat dalam implementasi PUG
 - c. Rendahnya kualitas hidup perempuan yang ditandai oleh rendahnya keterlibatan perempuan di legislatif dan kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga yang dicapai oleh kabupaten/kota
 - d. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO serta rendahnya peran lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO;
 - e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan responsif gender termasuk penyediaan data gender dan anak

1.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang terdiri dari unsur indikator masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Indikator masukan (input) adalah gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas dan kehematan).

Indikator proses (process) adalah gambaran mengenai langkah langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekwensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan atau standar).

Indikator keluaran (output) adalah gambaran mengenai output dan bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, Kualitas dan efisiensi).

Indikator hasil (outcome) adalah gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas dan peningkatan pendapatan).

Indikator dampak (impact) adalah gambaran akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan atau indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan yang didasarkan pada upaya pencapaian sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Melalui rencana kinerja berbagai kegiatan tahunan dapat disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, telah ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan, yaitu :

No	MISI KOTA DUMAI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	2.	3.	4.
1.	Misi ke-4 : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak-hak anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja perempuan 3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar 4. Capaian Kota Layak Anak 5. Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit Organisasi yang bersangkutan, yaitu :

- a. Spesifik ;
- b. Dapat dicapai ;
- c. Relevan ;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur ;
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Prinsip-prinsip pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, transparansi, guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 ini kiranya dapat direalisasikan, sehingga permasalahan operasional yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat teratasi.

Dumai, 26 Agustus 2021
Plt. Kepala

Ir. ZULKARNAIN, M. Si
NIP.19670123 199312 1 001